

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Terlaksananya pembangunan yang tepat sasaran merupakan buah dari interaksi yang aktif antara pemerintah nagari dengan kelompok-kelompok masyarakat. Dialektika yang dibangun memungkinkan masyarakat dan elemen lainnya bertukar pikiran sehingga melahirkan keputusan yang berkeadilan. Itu dilakukan oleh pemerintah Nagari Kinali dengan masyarakat dalam wadah musyawarah nagari untuk menghasilkan mufakat. Melirik pada penelitian yang peneliti lakukan di Nagari Kinali dengan menggunakan teori tata kelola pemerintahan dari Loina Lalolo krina yang berfokus pada tiga variabel, Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi. Peneliti menyimpulkan bahwa Tata Kelola Pemerintahan Nagari Kinali sudah berjalan dengan baik.

Dinilai dari akuntabilitas, dalam proses pembuatan keputusan sudah berjalan dengan baik. Bagaimana interaksi yang dijalin oleh Pemerintah Nagari Kinali dengan masyarakat untuk menerapkan prinsip akuntabilitas yang baik. Dalam pengelola dan pelaporan keuangan sudah cukup baik karena sudah mulai secara elektronik. Pelaporan RKP pertahunnya juga selalu tepat waktu dan tidak ada keterlambatan. Bahkan mendapatkan prestasi sebagai nagari yang tertib administrasi. Dalam sosialisasi keputusan atau kebijakan yang diambil sudah cukup maju, pemerintah nagari sudah menggunakan media internet.

Berdasarkan sudut pandang Transparansi, peneliti melihat pemerintah Nagari Kinali sudah Transparan dalam penyelenggaraan pemerintah nagari. Hal itu juga didukung oleh adanya *website* nagari. namun penggunaan *website* belum efektif secara keseluruhan. Untuk Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBN) pertahunnya itu selalu dipajang di kantor wali dan anggaran Dana Desa juga dibuatkan balihonya setelah itu dipasangkan di tempat-tempat umum. Kemudian dokumentasi kegiatan sosialisasi dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah nagari, itu selalu di *update* setiap ada kegiatan yang dilakukan pada *Facebook* dan *Instagram*.

Jika dilihat dari partisipasi masyarakatnya, Nagari Kinali memiliki partisipasi yang cukup tinggi. Keikutsertaan masyarakat tersebut dapat dilihat dalam perencanaan pengambilan keputusan, seperti ikut aktif memberikan pendapat. Dalam pelaksanaan mereka juga ikut aktif bersama-sama misalnya pembuatan jalan. Kemudian untuk pelaporan juga membersamai bamus dalam mengevaluasi LKPj dari pemerintah nagari.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat sejumlah kekurangan dan potensi perbaikan yang perlu diperhatikan. Penelitian ini mengadopsi teori Tata Kelola Pemerintahan dari Loina Lalolo Krina, yang terfokus pada tiga prinsip utama, yaitu Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi. Oleh karena itu, peneliti menawarkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan Tata kelola pemerintah Nagari Kinali sudah didukung oleh fasilitas yang cukup memadai mulai dari adanya *website* dan akses jaringan yang cukup stabil. Namun, diharapkan pemerintah nagari dapat mengembangkan pelayan yang lebih baik lagi dan informasi yang mudah diperoleh secara eletronik.
2. Tidak hanya berfokus pada organisasi yang memperdayakan perempuan saja. Namun juga mewedahi organisasi untuk para pemuda-pemudinya. Pada Nagari Kinali sudah ada aturan untuk membentuk Karang Taruna namun belum ada dibentuk.
3. Pemerintah Nagari Kinali hendaknya membuat mekanisme pelaporan dan pengaduan bagi masyarakat.
4. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk melakukan penelitian lainnya yang mengkaji tentang tata kelola pemerintahan. Kemudian untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan menggunakan teori lain yang relevan sehingga keterbaruan riset yang diperoleh lebih menarik. Hal tersebut juga dikarenakan masih banyak kekurangan peneliti pada penelitian ini.